



## Anggota Dewan Ingatkan Bupati Soal Aset

Gianyar (Bali Post) -

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2014 menuai apresiasi positif dari berbagai kalangan. WTP untuk pertama kalinya bagi Gianyar tersebut dinilai sebagai pencapaian membanggakan. Namun, tantangan untuk mempertahankan WTP jauh lebih berat. Terlebih lagi terdapat sejumlah hal di pemerintahan yang harus segera dibenahi.

Ketua Komisi III DPRD Gianyar A.A. Gede Agung Wiramantara, Selasa (9/6) kemarin, mengungkapkan, pihaknya memberikan apresiasi pada bupati dalam tata kelola pemerintahan terutama keuangan pemerintah daerah sehingga Gianyar mampu meraih WTP. Meski demikian, pihaknya tetap mengingatkan agar pemerintah dan segenap komponen tidak lantas puas dengan raihan tersebut.

Ke depan, kata dia, upaya mempertahankan WTP akan jauh lebih sulit. Tantangan akan makin berat. Untuk itu, pemerintah harus mampu melakukan pembenahan di berbagai bidang. Salah satunya menyangkut tata kelola aset daerah. Pengelolaan aset menjadi bagian penting lantaran masalah ini kerap menjadi kendala bagi sebagian besar pemerintahan dalam meraih WTP.

Pihaknya pun meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis, salah satunya sertifikasi aset daerah. Dengan upaya tersebut, nantinya pendataan aset akan lebih baik dan secara kumulatif akan diketahui pergerakan dari aset daerah. "Sesuai arahan BPKP, semua bentuk aset agar disertifikasi. Saat ini kan belum dilakukan, karena arahan baru saja diberikan beberapa hari lalu. Tapi ini perlu segera ditindaklanjuti," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, predikat WTP menjadi stimulus dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun hal yang tak kalah penting adalah bagaimana program-program pemerintah mampu tepat sasaran. Program yang dijalankan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Bupati Gianyar A.A. Gde Agung Bharata juga meminta seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemkab Gianyar tidak berpuas hati dengan opini WTP dari BPK.

Saat memimpin apel di Kantor Bupati Gianyar, Senin (7/6), dia menekankan, WTP justru menjadi motivasi untuk lebih memantapkan pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Mempertahankan predikat tersebut bukanlah hal mudah. Dia pun meminta semua pegawai terus menerapkan sikap disiplin dalam bekerja. Pegawai harus lebih disiplin, profesional, meningkatkan kompetensi dan kerja sama. Karena berdasarkan pengalaman, yang paling menjadi masalah dalam menjalankan tugas adalah kurangnya disiplin dan kerja sama di antara pegawai.

Selain itu, Bupati Agung Bharata mengingatkan soal penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terutama dalam proses pengisian jabatan. Undang-undang mengamanatkan adanya sistem lelang jabatan. Bupati pun berharap agar semua pegawai meningkatkan kompetensinya. (kmb25)

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 11



## Banggar dan TAPD Badung Bahas APBD-P 2015 dan KUA/PPAS 2016

BADAN Anggaran (Banggar) DPRD Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung, Selasa (9/6) kemarin menggelar rapat awal untuk membahas APBD-P 2015 dan KUA/PPAS 2016. Pembahasan awal ini pertama kali digelar sebelum Rancangan APBD-P 2015 dan KUA/PPAS 2016 masuk ke DPRD Badung.

Pembahasan dari tim Banggar dipimpin langsung Ketua DPRD Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Ketua I Ketut Suiasa dan Wakil Ketua II yang juga Koordinator Banggar I Made Sunarta. Sedangkan TAPD yang hadir dikomandani langsung Sekda Badung Kompyang R. Swandika didampingi jajarannya seperti Kepala Bappeda Badung I Wayan Suambara, Kadispenda I Wayan Adi Arnawa, Kepala Bagian Keuangan I Ketut Gede Suyasa dan Kadisosnaker IB Oka Dirga.

Koordinator Banggar I Made Sunarta mengatakan ada sejumlah persoalan yang digodok dalam pembahasan Banggar dan TAPD tersebut. Di antaranya masalah pelimpahan kewenangan di bidang pendidikan SMA dan SMK kepada pemerintah provinsi. Menurutnya, pelimpahan kewenangan ini akan berimplikasi terhadap pengurangan dalam anggaran, namun di lain sisi alokasi 20 persen APBD untuk sektor pendidikan tetap harus dialokasikan. Nah untuk itu perlu ada satu kebijakan penganggaran yang tetap dapat menjamin pelaksanaan wajar 12 tahun dan peningkatan kualitas pendidikan bagi SMA dan SMK.

Sesuai Permendagri 37/201 tentang pedoman penyusunan APBD, Banggar juga menyoroti tidak bolehnya kepala daerah dan DPRD mendapat BPJS. Selain itu program BPJS Kes-

ehatan khusus untuk tenaga kontrak dan THL juga tidak mendapat tanggungan BPJS. "Soal BPJS ini kami di Banggar minta agar ada sinergi program BPJS dengan JKBM dan JKKB Manguwaras, sehingga alokasi dana berjalan efektif tidak tumpang tindih serta tidak bertentangan dengan aturan," kata Sunarta.

Sementara di bidang standar belanja, ia juga minta ada evaluasi sehingga sedapat mungkin dapat disesuaikan antara PMK No. 64/pmk.02/2015 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2015 dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga tidak muncul keluhan akibat terbatasnya anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional SKPD. "Dalam hal ini beberapa yang menonjol itu seperti BBM, pemeliharaan kendaraan serta pemeliharaan fasilitas publik,"

beber Sunarta.

Yang paling getol disuarakan Banggar adalah soal dana bergulir untuk koperasi dan UMKM. Dana ini dalam beberapa tahun anggaran sudah tidak dialokasikan lagi. Ke depan Banggar minta ada kebijakan dari pemerintah agar koperasi dan UMKM kecipratan dana lagi.

Politisi Demokrat ini berharap dengan adanya pembahasan yang lebih awal ini segala aspirasi yang ada baik di legislatif, esekutif maupun masyarakat bisa tertampung dalam APBD-P dan KUA/PPAS, sehingga saat pembahasan bersama nanti tidak ada aspirasi yang tercecer.

Sunarta menambahkan, hari ini, Rabu (10/6), Banggar akan menggelar konsultasi ke Kemendagri untuk mengonsultasikan masalah penyusunan APBD-P 2015 dan KUA/PPAS 2016. (ad723)



RAPAT - Banggar DPRD Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung, Selasa (9/6) kemarin menggelar rapat awal untuk membahas APBD-P 2015 dan KUA/PPAS 2016.

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 5



# Dewan Temukan Kejanggalan Setoran Pajak Perusahaan Beton

Gianyar (Bali Post) -

Komisi I dan Komisi III DPRD Gianyar, Selasa (9/6) kemarin, menggelar sidak ke sejumlah perusahaan pemasok beton dan aspal siap pakai di seputaran Jalan By-pass I.B. Mantra, Blahbatuh. Hasilnya, dewan menemukan kejanggalan pada pembayaran pajak air tanah di tiga perusahaan itu.

"Ada lima perusahaan di jalan by-pass. Tiga di antaranya masih beroperasi, sedangkan dua lagi sudah tutup. Dari tiga ini, kami temukan permasalahan pembayaran pajak air tanah. Telah terjadi kebocoran pajak sehingga potensi pajak air tanah selama ini menguap," kata Ketua Komisi III DPRD Gianyar, A.A. Gede Agung Wiramantara.

Tiga perusahaan dimaksud yakni PT Harapan Jaya Beton, PT SCG Readymix

Indonesia, dan PT Sinar Bali Beton. Permasalahan serupa terjadi di Harapan Jaya Beton dan SCG. Kedua perusahaan ini sama-sama menggunakan air yang bersumber dari air tanah (air bawah tanah). *Water meter* pun telah dipasang. Akan tetapi, dewan menemukan *water meter* di kedua perusahaan tersebut tidak berfungsi.

Alhasil, data penggunaan air tanah tidak akurat. Faktanya, pajak yang dikenakan menggunakan sistem akumu-

latif bukan berdasarkan data riil *water meter*. "Sudah tidak sesuai. Ini menyimpang dari Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah," kata Wiramantara.

Dalam Perda terdapat ketentuan mengenai pengenaan tarif. Di antaranya, 0 sampai 50 kubik dikenakan tarif Rp 18 ribu per kubik. Sedangkan di atas 50 hingga 100 kubik dikenakan tarif Rp 20 ribu per kubik. Sementara pada kasus dua perusahaan tersebut, menggunakan sistem akumulatif atau perkiraan yang jauh lebih rendah ketimbang perhitungan berdasarkan data *water meter*. Rata-rata pembayaran pajaknya hanya Rp 369 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan. Ini jauh lebih rendah dari perhitungan de-

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 11



Sambungan

wan yang mencapai jutaan rupiah.

Di PT Sinar Bali Beton, katanya, justru lebih parah. Masalahnya, pajak justru disetor ke provinsi. Padahal sesuai amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pemungutan pajak air tanah telah dilimpahkan ke pemkab.

Lebih lanjut Wiramantara mengatakan, permasalahan pembayaran pajak di sejumlah perusahaan itu diduga sudah berlangsung sejak lama. Itu berarti potensi pajak yang telah menguap cukup tinggi. Hal ini jelas sangat merugikan daerah. Apalagi mengingat pendapatan dari pajak air tanah di triwulan pertama

tahun 2015 belum memenuhi target yakni masih kurang 0,05 persen. Pendapatan di triwulan pertama baru Rp 1,145 miliar. Jumlah tersebut 33,28 persen dari target di APBD 2015 yang sebesar Rp 3,7 miliar.

"Rekomendasi kami agar Kadispenda mengoptimalkan pemungutan pajak. Petugas harus lebih teliti dan mengecek secara detail di lapangan. Yang jelas kami akan panggil instansi terkait khususnya Dispenda untuk meminta penjelasan upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk mengintensifkan pemungutan pajak. Kami juga akan meminta penjelasan terkait masalah pembayaran pajak air tanah yang ke provinsi," katanya. (kmb25)

Edisi : Rabu, 11 Juni 2015

Hal : 11



## Dugaan Korupsi "Fraud"

# Dirut BPD Bali Kembali Diperiksa

Denpasar (Bali Post) -

Berkas kasus dugaan korupsi dengan modus *fraud* (deposito fiktif, bukan pinjaman fiktif seperti berita sebelumnya) hingga mencapai Rp 1,7 miliar di BPD Bali, dipastikan belum rampung. Selasa (9/6) kemarin, penyidik Kejati Bali kembali memanggil dan memeriksa dua saksi yang merupakan pentolan di satu-satunya bank milik Pemerintah Daerah Bali itu. Mereka adalah Dirut Bank BPD Bali Made Sudja yang sudah pernah diperiksa sebelumnya, dan mantan Plt. BPD Cabang Tabanan 2013-2014, Wayan Suartika. "Ya, hari ini (kemarin, red) dua orang saksi. Mereka adalah Dirut BPD Bali dan Plt. Cabang Tabanan tahun 2003/2014," jelas Kasipenkum Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan.

Dia menambahkan, ked-

uanya diperiksa jaksa yang berbeda. Dirut BPD diperiksa oleh jaksa Fitrah, sedangkan Suartika diperiksa jaksa Suardi. Khusus untuk dirut, yang bersangkutan sebelumnya sudah pernah diperiksa. Hanya saja saat ditanya soal materi pemeriksaan kembali, Ashari enggan menjelaskan dengan dalih bahwa itu kewenangan penyidik. "Jangan soal materi. Intinya, Dirut BPD Bali diperiksa untuk melengkapi alat bukti," tegasnya.

Sementara Suartika, Ashari mengatakan dia baru sekali diperiksa. "Beliau diperiksa untuk yang pertama," jelasnya. Pun saat didesak materi pemeriksaan, Ashari enggan membeberkannya. Yang jelas, kata dia, saksi diperiksa mulai pukul 09.30 Wita hingga pukul 12.00 Wita.

Informasi lainnya, tersang-

ka dalam perkara ini adalah WS yang tak lain Wayan Sukaja, bukan Wayan Sutarjana sebagaimana yang beredar di kejaksaan. WS adalah karyawan (sekarang mantan) bagian *marketing* dan kredit di Bank BPD Cabang Tabanan. Terungkapnya kasus ini, berkat Satuan Audit Internal dan Anti Fraud. Itu juga dilatari atau didahului pemeriksaan dan perbandingan data dan verifikasi serta menganalisa aktivitas *teller* dengan bukti transaksi yang terindikasi *fraud*.

Sebelumnya diberitakan, Senin (8/6) pihak kejaksaan memeriksa empat orang saksi. Informasi teranyar, akibat perbuatan tersangka, kemungkinan besar kerugian negara akan bertambah dari 1,7 miliar. Ini dikarenakan bunga tetap dihitung sehingga bisa menjadi 2,4 miliar. (kmb37)

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 3



## Kasus CPNS

# Tersangka Jagrem dan Candra Dewi Ditahan

Tabanan (Bali Post) -

Setelah diperiksa sebelumnya, I Gede Jagrem dan Nyoman Candra Dewi, Selasa (9/6) kemarin kembali diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan terkait kasus pemerasan. Yang mengejutkan, meski kedua tersangka tersebut kooperatif memenuhi panggilan penyidik, keduanya akhirnya ditahan dan ditiptkan di LP Tabanan.

Raut wajah kesal bercampur sedih bahkan terpancar ketika mereka dibawa menuju mobil tahanan kejaksaan. Candra Dewi yang kini masih menjabat Kasubag Hukum dan Kepegawaian di DKP pun tak bisa menyembunyikan air matanya ketika putrinya menghampirinya. Begitu juga Jagrem, mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP ini. Ia hanya diam dengan raut wajah kesal masuk ke dalam mobil tahanan kejaksaan.

Awalnya, baik Jagrem maupun Candra Dewi memang dipanggil penyidik kejaksaan untuk kembali menjalani

pemeriksaan kedua setelah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka pun datang sekitar pukul 10.00 wita dengan didampingi kuasa hukum. Keduanya pun tak menyangka jika akhirnya harus mendekam di balik jeruji usai pemeriksaan kedua.

Kuasa hukum kedua tersangka Nyoman Nadayana, S.H., M.M. mengaku kaget terhadap keputusan kejaksaan yang dinilai belum layak dilakukan penahanan. "Keduanya dipanggil untuk memperjelas uang pinjaman dari Candra Dewi ke salah seorang pegawai. Awalnya saya tidak

punya firasat apapun, hingga sekitar pukul 13.30 wita datang tim medis memeriksa kesehatan kedua klien. Pengalaman saya, kalau sudah diperiksa kesehatan pasti arahnya ke penahanan, dan betul itu terjadi," jelasnya.

Terkait penahanan kedua kliennya, dirinya pun berencana membuat surat penangguhan penahanan serta mempersiapkan diri menyusun gugatan praperadilan. "Untuk gugatan praperadilan kami butuh waktu satu minggu," ucapnya.

Ia menyoroti ada perbedaan sangkaan antara surat

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 16



pemanggilan dengan surat penetapan penahanan. "Dalam panggilan mereka untuk BAP disebutkan melakukan pemerasan, tiba-tiba dalam surat yang diberikan ke saya selaku kuasa hukum disebutkan tindak pidana korupsi. Bagaimanapun juga kami akan melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya," tegasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Atang Bawono, S.H., M.H. didampingi Kasi Pidsus Fathur Rochman menjelaskan penahanan kedua tersangka tersebut setelah melihat hasil akhir pemeriksaan telah melanggar pasal yang disangkakan, yakni pasal 12 e UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun maksimal 20 tahun atau seumur hidup, dengan denda minimal Rp 500

juta maksimal Rp 1 miliar.

"Penahanan kedua tersangka ini kami lakukan agar keduanya tidak melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti," ujar Atang Bawono.

Meski telah menahan kedua tersangka, ditegaskannya tim penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan akan terus melanjutkan penyidikan. Disinggung apakah kemungkinan akan adanya penambahan tersangka, pejabat asal Sukoharjo ini tidak menutup kemungkinan itu bisa saja terjadi. "Semua itu sekarang tergantung alat bukti, keterangan saksi dan keterangan tersangka," imbuhnya.

Disinggung tentang gugatan praperadilan yang akan dilakukan oleh kuasa hukum kedua tersangka, Atang Bawono mengatakan itu hak para tersangka. (kmb28)

Edisi : RCbu, 10 Juni 2015

Hal : 16



## Sidak Rehab Pasar Jembrana Ditarget Rampung Tahun Ini

Negara (Bali Post) -

Menghadapi pasar bebas, penguatan pasar tradisional sebagai pilar ekonomi kerakyatan penting dilakukan untuk dapat bersaing. Di sinilah peran pemerintah dengan membangun dan memperbaiki pasar tradisional. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Made Kembang Hartawan, Selasa (9/6) pagi saat melakukan sidak di Pasar Umum Jembrana yang tidak lama lagi akan direhab.

Wabup Kembang yang didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) I Made Yasa dan Kabid Perdagangan I Komang Susila mengatakan dalam perbaikan pasar yang tidak kalah penting diperhatikan ialah terkait relokasi. "Persiapan relokasi para pedagang sangat penting untuk diperhatikan, karena dalam minggu-minggu ini, perbaikan pasar umum Jembrana segera digarap dan selesai tahun ini," kata Kembang.

Pemerintah berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan, melalui pembangunan pasar tradisional. Selama ini telah dibangun dan direnovasi sedikitnya sepuluh pasar. Di antaranya tahun 2012 Peken Ijo Gading, Pasar Senggol Pekutatan, tahun 2013 Pasar Yeh Embang, Pasar Gilimanuk, Pasar Melaya, dan Pasar Lelateng. Pada tahun 2014 Pasar Desa Batu Agung, Pasar Desa Baler Bale Agung, Pasar

Senggol Yehembang, dan Pasar Tanten Banjar Tengah. "Tahun ini yang direnovasi ialah Pasar Umum Jembrana dan Pasar Umum Pekutatan, targetnya akhir tahun ini bisa tuntas," tegas Kembang.

Selain infrastruktur untuk mendukung aspek kebersihan dan kenyamanan, pemerintah juga melindungi pasar tradisional dengan Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. "Perda ini membatasi untuk pasar modern berjejaringan, kecuali yang sudah ada, atau pengusaha lokal," pungkas Kembang. Sehingga pedagang pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar modern berjejaringan.

Terkait dalam waktu dekat ini ada upacara *pamelaspas* Balai Banjar Menega, Kelurahan Dauh Waru, dan upacara (*karya*) di Puri Jembrana, lantaran lokasi pasar berdekatan dengan kedua tempat itu, Wabup meminta kepada Dinas terkait agar keberadaan pasar di tempat relokasi harus terus dipantau. Termasuk parkir yang meluber sampai ke jalan besar. Para pedagang di Pasar Umum Jembrana kemarin mulai persiapan perpindahan (relokasi) ke lokasi yang telah disiapkan. Lokasi relokasi nampak disiapkan berjejer 100 meter di sepanjang jalan di sisi timur pasar, menggunakan setengah dari jalan. (kmb26)

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 14



## Sidang Dugaan Korupsi dan TPPU

# Diduga Ada Saksi yang Bohong

Denpasar (Bali Post) -

Sudah sempat menjadi saksi untuk terdakwa Tim 9, namun mantan Bupati Klungkung dua periode, terdakwa I Wayan Candra, Selasa (9/6) kemarin, kembali dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Made Pasek, dkk. Tujuannya, untuk mengonfrontir keterangan antara Candra, eks Plt. Kadis Perhubungan Klungkung I Wayan Tika, Ni Made Anggara Juni Sari dan mantan Camat Dawan Wayan Sujana.

Di antara kesaksian mereka, ada yang berbeda sehingga ada yang diduga berbohong. Sidang kemarin adalah untuk terdakwa I Ketut Janapria, I Made Ngurah dan A.A. Sagung Mastini. Majelis hakim diketuai Beslin Sihombing setuju keterangan saksi tersebut dikonfrontir karena ada yang diduga "berbohong". Namun dari empat saksi itu, Wayan Sujana tidak hadir karena ada kesibukan lain.

Sidang kemarin dikawal satu pledon dalmas Polresta Denpasar karena Ni Made Anggara Juni Sari adalah saksi di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengawalan pun sedikit ketat. Oleh jaksa, kesaksian Angga juga yang pertama didengarkan. Di depan persidangan, Angga mengaku bahwa dia tidak pernah membeli tanah

di lokasi yang akan digunakan untuk Dermaga Gunaksa tersebut. Dia mengaku KTP miliknya sempat dipinjam Bupati Klungkung, Wayan Candra untuk suatu keperluan. Anggara mengaku KTP miliknya digunakan untuk membeli tanah di Gunaksa. Bahkan, Anggara yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini mengaku sempat menandatangani akta jual-beli di notaris terkait tanah di Gunaksa tersebut.

Selain itu, Anggara juga mengaku sempat menandatangani kuitansi pembayaran ganti rugi untuk pembangunan Dermaga Gunaksa Rp 1,1 miliar. "Saya sempat tanda tangan kuitansi tersebut di ruang Sekpri Bupati Klungkung," jelasnya.

Hakim kemudian mengejar soal uang Rp 1,1 miliar tersebut. "Masak kamu tidak terima sepeser pun uang itu," tanya hakim. Anggara pun menjelaskan, dia tidak pernah terima uang tersebut.

Tak lama berselang, mantan Bupati Candra didengar keterangannya. Keterangan Anggara dibantahnya. Ia mengatakan tidak pernah menggunakan KTP milik Anggara untuk membeli tanah di Gunaksa. Termasuk, meminta Anggara menandatangani pembayaran ganti rugi tanah Rp 1,1 miliar di ruang Sekpri Bupati Klung-

kung. "Tidak benar semua keterangan tersebut," ujar Candra saat ditanya majelis hakim.

Sementara itu, Plt. Kadishub Klungkung Tika yang dihadirkan sempat beberapa kali dibentak majelis hakim karena membuat keterangan berubah-ubah. Awalnya, Tika sempat mengatakan jika uang ganti rugi untuk Anggara Juni Sari diambil Camat Dawan, Sujana atas perintah Candra. Namun saat ditegaskan majelis hakim, Tika berkelit dan mengatakan tidak tahu siapa yang menyuruh Sujana mengambil uang ganti rugi milik Anggara sebesar Rp 1,1 miliar tersebut. "Saya hanya membuat dua kuitansi pembayaran ganti rugi. Yang satu untuk Sujana karena dia yang bertanggung jawab mengambil uang dan satu kuitansi untuk Anggara," jelasnya.

Tika sempat dibentak pula karena saat ditanya nama yang tertera di kuitansi pembayaran untuk Anggara. Awalnya, Tika mengaku di kuitansi tersebut tertera nama Dinas Perhubungan. Namun ketika disuruh maju untuk melihat kuitansi, Tika langsung meralat dan mengatakan namanya yang

tertera. "Kamu baru maju selangkah saja sudah ganti keterangan," ujar Beslin dengan nada tinggi. (kmb37)

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 3